

NOTA - DINAS
No. 55/ND/XIX.MTR/01/2018

Kepada Yth : Tortama KN VI
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi NTB
Perihal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja TA 2017
Lampiran : Satu Berkas
Tempat, Tanggal : Mataram, 31 Januari 2018

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Akuntabilitas Kinerja TA 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (terlampir).

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono

NIP 197006011991031002

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Laporan
Akuntabilitas
Kinerja

LAK
2017



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (LAKIP BPK) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. LAKIP BPK tidak hanya mengikat BPK sebagai lembaga, namun juga mengikat unsur-unsur pelaksana BPK RI. LAKIP BPK merupakan cerminan dari pencapaian kinerja unit-unit kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai salah satu pelaksana BPK RI, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan LAK Unit Kerja Eselon II. LAK Unit Kerja Eselon II berisi tentang tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan sebagai pertanggungjawaban kinerja unit eselon II dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK. LAK BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah dasar penyusunan LAK Pelaksana BPK (LAK Unit Organisasi Eselon I).

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2017 ini akan mengurai tentang perencanaan strategis dan pernyataan komitmen pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB dan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

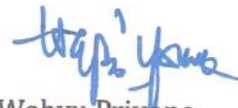
Dalam pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB, masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target yang tentunya akan menjadi perhatian dan evaluasi sehingga di masa yang akan datang dapat memenuhi seluruh target yang ada.

Demikian, semoga LAK BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2017 ini dapat bermanfaat dan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK.

Wabillahittaufig wal hidayah

Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 22 Januari 2018
Kepala Perwakilan BPK Provinsi
NTB



✓ Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang antara lain menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah ayat (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan ayat (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPK sebagai lembaga beserta unsur-unsur pelaksana BPK RI mempunyai kewajiban untuk menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain mengatur bahwa BPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana BPK dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi NTB merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan undang-undang tersebut, dimana Perwakilan Provinsi NTB adalah bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan perwujudan keberadaan BPK di Provinsi NTB. AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen Pendidikan Nasional serta

Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

1. Provinsi NTB;
2. Kota Mataram;
3. Kabupaten Lombok Barat;
4. Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kabupaten Lombok Timur;
6. Kabupaten Lombok Utara;
7. Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kabupaten Sumbawa;
9. Kabupaten Bima;
10. Kota Bima;
11. Kabupaten Dompu.

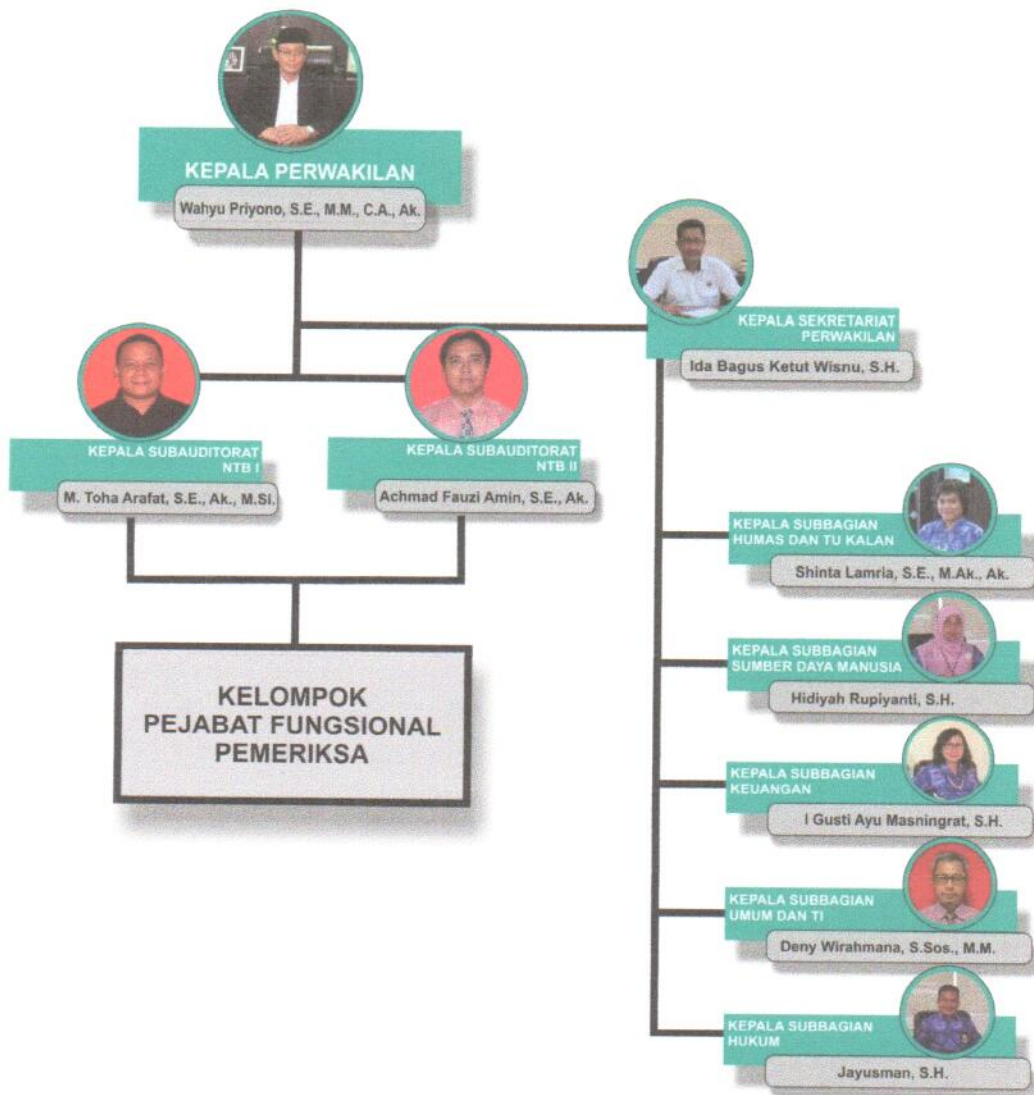
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

BPK Perwakilan Provinsi NTB dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian dan 40 orang Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditama Keuangan Negara VI yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan

fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

2. Subauditorat NTB I

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

3. Subauditorat NTB II

Subauditorat NTB II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2017 berjumlah 94 orang yang terdiri dari satu orang Kepala Perwakilan, satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 39 kelompok pejabat fungsional pemeriksa, 27 orang staf penunjang dan 19 orang tenaga kontrak.

Total Pagu Anggaran kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp19.156.804.000,00 terdiri dari Pagu DIPA BPK Pusat sebesar Rp7.947.958.000,00 dan Pagu DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.208.846.000,00, dengan realisasi sebesar Rp18.404.457.942,00 yang terdiri dari DIPA BPK Pusat sebesar Rp7.395.038.733,00 atau 93,04% dan DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.009.419.209,00 atau 98,22%.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016-2020 menetapkan visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis dan sasaran strategis, yaitu:

1. Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan visi dan misinya, BPK Perwakilan Provinsi NTB menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

b. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan visi dan misinya, BPK Perwakilan Provinsi NTB berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

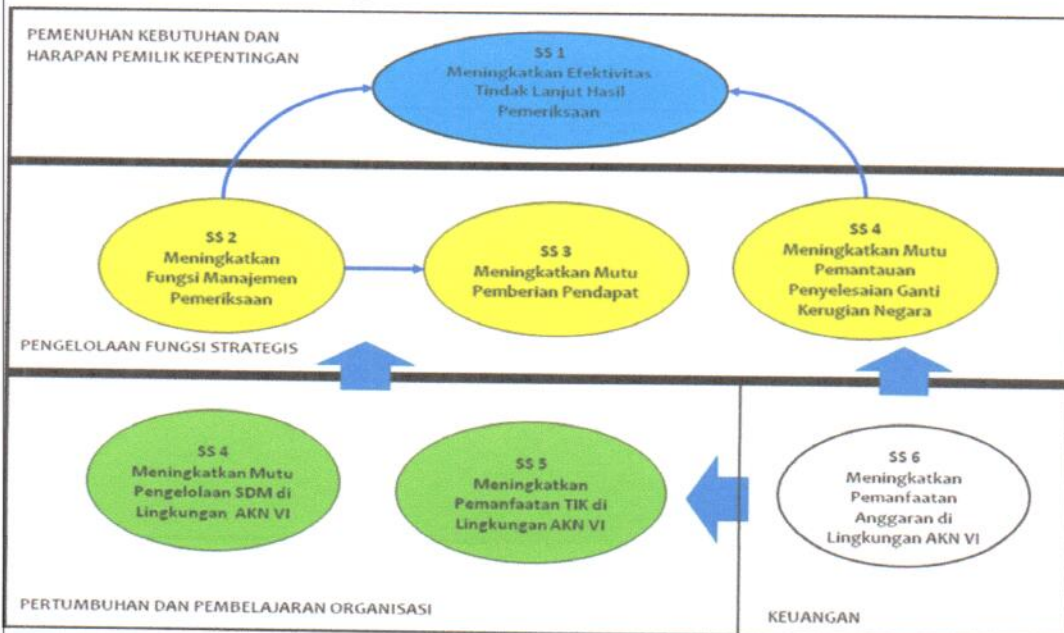
- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;

- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

5. Sasaran Strategis

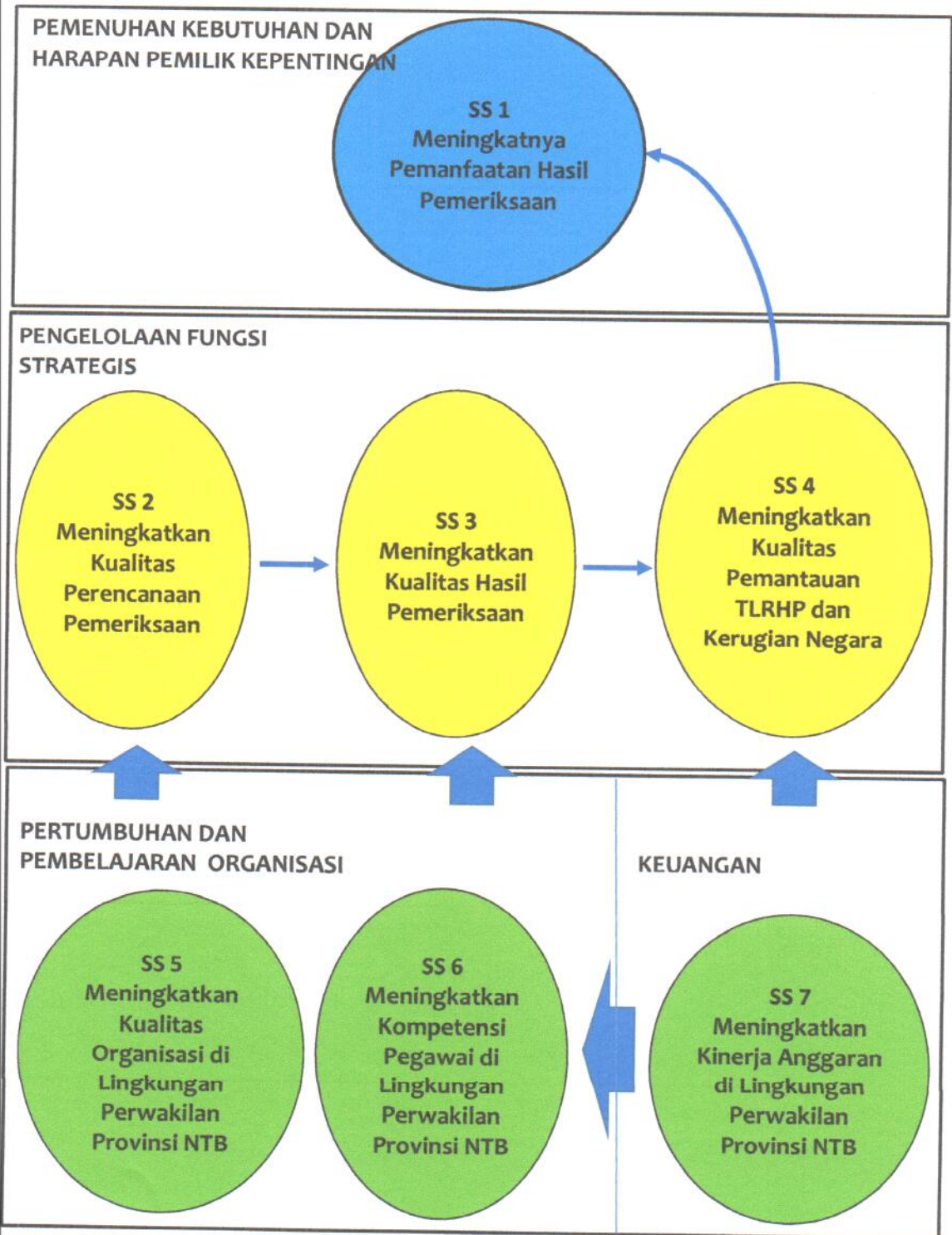
Dalam mendukung pencapaian visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan. Hal ini selaras dengan sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra BPK RI 2016-2020, yaitu SS 1 “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” dan SS 2 “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu”.

Untuk mencapai tujuan strategi tersebut, terdapat Peta Strategi BPK Eselon I (dhi. AKN VI) dan BPK Eselon II (dhi. Perwakilan). Adapun Peta Strategi BPK Eselon I (AKN VI) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Strategi BPK - Eselon I (AKN VI)

Sedangkan untuk perwakilan ditetapkan Peta Strategi BPK - Eselon II (Perwakilan) yang terdiri dari sembilan sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk sebagai berikut.



Gambar 3. Peta Strategis BPK Perwakilan

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK RI menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tiap-tiap satuan kerja. Perwakilan BPK sebagai satuan kerja tersendiri mempunyai 26 IKU dan atas masing-masing IKU tersebut ditetapkan target-target pencapaian kinerjanya. IKU beserta target pencapaian kinerjanya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I.

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menetapkan target pencapaian kinerja pada masing-masing IKU dan dituangkan ke dalam PKPK BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi NTB selaku Pejabat Eselon II dan Tortama VI selaku Pejabat Eselon I pada tanggal 11 Januari 2017.

Berikut diuraikan Sasaran Strategis (SS), IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2017 yang tertuang dalam PKPK.

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2017
1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%
	1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
	1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
	2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	13%
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
	3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
	3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
	3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7
	3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2017
	3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22
	4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A
	5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
	5.3 Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0%
	5.4 Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%
	5.5 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%
	5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
	5.7 Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
	5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%
	5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	95%
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	82%

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2017

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI NTB
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB)

A. Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2017

Pada tanggal 25 Januari 2018 bertempat di ruang rapat PSMK 2 Kantor Pusat BPK RI di Jakarta, dilaksanakan kegiatan minggu validasi SIMAK Semester II Tahun 2017 untuk melakukan penginputan atas nilai (skor) pencapaian kinerja seluruh satuan kerja eselon II. Dari kegiatan tersebut pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2017 sebagai berikut ini.

IKU	Uraian	Skor 2017	Target 2017	Capaian				
				2017	2016	2015	2014	2013
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB				98,37	97,06	94,43	92,90	94,65
SS.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	70%	87,19%	87,49%	85,12%	75,50%	56,49%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	101	100%	100%	101%	N/A	N/A	N/A
1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100	1	1	1	2	2	1
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	105	85%	95%	85%	N/A	N/A	N/A
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	105	20%	30%	22,73%	4	4	3
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-	-	73,33%	N/A	N/A	N/A
3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,7	4,58	4,37	N/A	N/A	N/A
3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	22	22	11	22	22	22

IKU	Uraian	Skor 2017	Target 2017	Capaian					
				2017	2016	2015	2014	2013	
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	50	100%	50%	0%	100%	100%	100%	
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan									
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	88,89	A	BB	A	N/A	N/A	N/A	
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	82,72	100%	82,72%	92,31%	N/A	N/A	N/A	
5.3	Jumlah Usulan Best-Practice	100	1	1	0%	N/A	N/A	N/A	
5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	-	-	-	0%	N/A	N/A	N/A	
5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100	100%	100%	91,67%	N/A	N/A	N/A	
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	105	2	5,4	3,80	2,80	2,3	2	
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	101,37	92%	93,26%	91,59%	91,21%	87,19%	85,70%	
5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100	100%	100%	-	-	-	-	
SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan									
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	94,74	100%	94,74%	87,50%	96,88%	89,29%	86,67%	
6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90,22	95%	85,71%	94,44%	82,72	86,63 jam	72,43 jam	
SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan									
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	98,15	82%	80,48%	88,25%	94,28%	95,32%	91,58%	

Tabel 2. Skor pencapaian kinerja tahun 2013 s.d. 2017

Secara umum terjadi peningkatan dalam capaian target IKU selama 4 tahun terakhir. Di tahun 2017 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB mencapai 98,37% dimana lebih besar dari 4 tahun sebelumnya, yang mana tahun 2016 skor kinerja sebesar 97,06%, tahun 2015 sebesar 94,43%, tahun 2014 sebesar 92,90% dan tahun 2013 sebesar 94,65%. BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berupaya meningkatkan skor capaian IKU ditahun-tahun berikutnya.

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2017 dengan Target 2017	Target 2017	Capaian					
				2017	2016	2015	2014	2013	
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB				98,37%	97,06	94,43	92,90	94,65	
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan									
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	124,56%	70%	87,19%	87,49%	85,12%	75,50%	56,49%	
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2017 dengan Target 2017	Target 2017	Capaian				
				2017	2016	2015	2014	2013
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	101%	N/A	N/A	N/A
1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	2	2	1
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	111,76%	85%	95%	85%	N/A	N/A	N/A
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	95%	20%	30%	22,73%	4	4	3
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	73,33%	N/A	N/A	N/A
3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	1,24	3,70	4,58	4,37	N/A	N/A	N/A
3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	1	22	22	11	22	22	22
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	50%	100%	50%	0%	100%	100%	100%
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan		A	BB	A	N/A	N/A	N/A
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	82,72%	100%	82,72%	92,31%	N/A	N/A	N/A
5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	1	1	1	0%	N/A	N/A	N/A
5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	-	-	-	0%	N/A	N/A	N/A
5.5	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
5.6	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	91,67%	N/A	N/A	N/A
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2,7	2	5,4	3,80	2,80	2,3	2

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2017 dengan Target 2017	Target 2017	Capaian				
				2017	2016	2015	2014	2013
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	101,37%	92%	93,26%	91,59%	91,21%	87,19%	85,70%
5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan								
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	94,74%	100%	94,74%	87,50%	96,88%	89,29%	86,67%
6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90,22%	95%	85,71%	94,44%	82,72	86,63 jam	72,43 jam
SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan								
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	98,15%	82%	80,48%	88,25%	94,28%	95,32%	91,58%

Tabel 3. Pencapaian IKU dalam Target Tahun 2017

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB di tahun 2017 secara umum telah sesuai dengan target lima tahunan. Banyak terdapat perubahan variabel dalam sasaran strategis kinerja sehingga banyak variabel yang tidak terdapat dalam sasaran strategis kinerja tahun sebelumnya. Periode 2013-2015 memuat sembilan sasaran strategis dan periode 2016-2017 memuat tujuh sasaran strategis.

A. SS.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini bertujuan agar BPK mampu memberikan rekomendasi bermutu yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak hasil pemeriksaan BPK.

Sasaran strategis 1 diukur melalui lima IKU yaitu:

- IKU 1.1 –Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
- IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara;
- IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli;
- IKU 1.5 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 3.646 dengan rincian sebagai berikut.

No	Status Tindak Lanjut	Jumlah	Persentase
1	Selesai ditindaklanjuti	3.162	86,72%
2	Masih dalam proses/Belum selesai ditindaklanjuti	432	11,85%
3	Belum ditindaklanjuti	36	0,99%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	16	0,44%
Jumlah rekomendasi yang disampaikan		3,646	100%

Tabel 4 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Auditee pada BPK Perwakilan Provinsi NTB mencapai 87,19% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Dengan demikian untuk IKU 1.1, Perwakilan Provinsi NTB dapat mencapai target walau pun terdapat beberapa hambatan yang pada umumnya masih ada entitas yang kurang aktif dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pencapaian tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,30% dari tahun sebelumnya.

IKU	Skor Tahun 2017	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun		
			2017	2016	2015
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	70%	87,19%	87,49%	85,12%

Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2017, 2016, dan 2015

Tercapainya IKU 1.1 tidak terlepas dari peran BPK Perwakilan Provinsi NTB yang secara rutin tiap semester menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Semester I tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2017 pada tanggal 24 s.d. 26 Juli 2017. Sedangkan untuk semester II tahun 2017 kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2017.



Gambar 4 Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I 2017



Gambar 5 Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II 2017

2. IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU 1.2 ini merupakan IKU bonus. Sampai dengan berakhirnya Semester II Tahun 2017, belum ada penyampaian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH. Sehingga realisasinya dianggap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

3. IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK). Selama tahun 2017, belum ada hasil pemeriksaan yang berindikasi unsur pidana dan/atau permintaan penghitungan kerugian negara. Karena IKU 1.3 ini juga masih merupakan IKU bonus, maka realisasinya dianggap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

4. IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

IKU ini mengukur sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. Di tahun 2017 ini, belum ada permintaan pemberian keterangan ahli. Karena IKU 1.4 ini juga masih merupakan IKU bonus, maka realisasinya dianggap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

5. IKU 1.5 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas AKN terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Perwakilan NTB telah mengirimkan satu usulan bahan pendapat kepada Ditama Revbang melalui Nota Dinas Nomor 351/ND/XIX.MTR/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yaitu Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2017 sebesar 1. Sesuai dengan jawaban Nota Dinas dari Direktorat EPP Nomor 466/ND/XII.2/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 bahwa usulan bahan pendapat tersebut diterima sebagai capaian IKU sehingga bahan pendapat yang diterima sebagai capaian IKU sebesar satu bahan pendapat.

Perbandingan capaian Tahun 2017 dengan capaian Tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKU	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun		
			2017	2016	2015
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	2

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 1.5 Tahun 2017, 2016 dan 2015

B. SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan NTB. Melalui SS ini, BPK Perwakilan NTB melakukan pengendalian mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kode etik pemeriksa, dan kebutuhan pemangku kepentingan. SS ini juga mencakup upaya peningkatan lingkup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan agar lebih efisien dan efektif melalui pengelolaan biaya pemeriksaan yang optimal dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. SS 2 diukur melalui dua IKU sebagai berikut.

- IKU 2.1 – Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
- IKU 2.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

1. IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahun 2017 ini, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melakukan satu kali revisi RKP. Revisi diajukan pada tanggal 12 Juli 2017 sesuai dengan nota dinas Kepala Perwakilan nomor 229/ND/XIX.MTR/07/2017.

Jumlah LHP yang diterbitkan pada Tahun 2017 yakni sebanyak 31 LHP dan sesuai dengan target yang ditetapkan. LHP tersebut terdiri dari 11 LHP LKPD, 6 LHP Kinerja dan 14 LHP DTT.

Realisasi tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan tahun 2017 sebesar 95%, yang mana telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu 85%.

2. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP

Skor IKU 2.2 pada Tahun 2017 adalah sebesar 105 karena mampu merealisasikan 6 LHP Kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 6 LHP Kinerja. Di tahun 2017 realisasi rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP sebesar 30% melebihi dengan target yang ditetapkan yaitu 20%.

C. **SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**

1. **IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan**

IKU ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP). Tahun 2017 pemenuhan *Quality Control* (QC) pemeriksaan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

2. **IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan**

IKU ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Pencapaian BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memenuhi target sebesar 100% dari target 100%.

Perbandingan capaian Tahun 2017 dengan capaian Tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

IKU	Skor Tahun 2017	Target Tahun 2017	Capaian Tahun		
			2017	2016	2015
3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%

Tabel 7 - Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2017, 2016 dan 2015

Selama tiga tahun berturut-turut target Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan telah terpenuhi.

3. **IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP**

IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (*Zero defect*) maka LHP harus 100% akurat.

Akan tetapi, di tahun 2017 ini, Tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP belum diperhitungkan.

4. **IKU 3.4 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK**

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. IKU ini diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan.

Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

Realisasi indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK tahun 2017 sebesar 4.58 yang mana telah melebihi target tahun 2017 sebesar 3,7.

5. **IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP**

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian pemeriksaan yang dinyatakan dalam P2.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian LHP tahun 2017 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.



Gambar 6 Penyerahan LHP LKPD TA 2016

6. **IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang**

IKU 3.6 ini merupakan IKU bonus. Sampai dengan berakhirnya Semester II Tahun 2017, belum ada LHP BPK yang digugat. Sehingga realisasinya dianggap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

D. **SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

1. **IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

IKU ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Realisasi tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2017 adalah sebesar 100% yang mana telah memenuhi target 2017 sebesar 100%.

Semester I Tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2017 pada tanggal 24 s.d. 26 Juli 2017. Sedangkan untuk semester II tahun 2017 kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2017.

2. IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang.

Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

Realisasi IKU 4.2 jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara tahun 2017 telah mencapai target yaitu sebanyak 22 laporan dari target 2017 sebesar 22. Target dapat tercapai karena tahun 2017 jadwal pemeriksaan pemantauan penyelesaian kerugian negara dilaksanakan sebanyak 3 kali, untuk memperbaiki kesalahan periode pemeriksaan sebelumnya.

3. IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang tahun 2017 sebesar 50% dimana tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan jadwal pemeriksaan pemantauan penyelesaian kerugian negara semester I Tahun 2017 terlambat dilaksanakan, karena perbedaan pemahaman akan periode pemeriksaannya.

E. SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

1. IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Realisasi hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan tahun 2017, dinilai BB dimana belum memenuhi dengan target tahunan senilai A.

2. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi di tahun 2017 sebesar 82,72%. Realisasi tersebut belum memenuhi dengan target tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penggunaan layanan email, e-drive, SISDM dan portal e-audit.

3. IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice

IKU ini mengukur tingkat penyusunan *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. Pada tahun 2017 persentase penyusunan *best-practice* tidak ditargetkan. IKU 5.3 ini telah terealisasi sebesar 1 dengan usulan *best practice* "Pemanfaatan Grup Whatsapp Sinergi Pengawasan untuk Informasi yang Memadai" dan telah disetujui oleh PSMK sesuai nota dinas nomor 13/ND/XII.1/01/2018 tanggal 9 Januari 2018.

4. IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyebaran *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. Pada tahun 2017 persentase penyebaran *best-practice* tidak ditargetkan. Dikarenakan usulan *best practice* baru disetujui di bulan Januari 2018, maka penyebaran *best practice* belum dapat dilakukan.

5. IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja perwakilan tahun 2017 adalah sesuai target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. LAK 2016 disampaikan dengan nota dinas nomor 53/ND/XIX.MTR/02/2017 tanggal 9 Februari 2017.

6. IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan tahun 2017 adalah sebesar 100% dimana telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.

7. IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IKU ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada tahun 2017 realisasi jumlah media relation yang dilaksanakan adalah sebesar 5,4 dimana melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 2.

Media Relation yang dilaksanakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. Siaran Pers "BPK Serahkan LHP atas LKPD TA 2016" yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2017.



Gambar 7 Siaran Pers tanggal 31 Mei 2017

- b. Media Workshop dengan tema "Penyerahan LHP atas LKPD se-Provinsi NTB TA 2016" yang diselenggarakan pada tanggal 2 juni 2017. Acara Media Workshop ini mengundang rekan-rekan dari media cetak seperti Lombok Post, Suara NTB, Radar Lombok. Media elektronik seperti TVRI, TV9, Lombok TV, Mataram News, RRI Mataram, Global FM, Inews TV dan media online seperti Garda Asakota, Suara NTB.com.



Gambar 8 Media Workshop tanggal 2 Juni 2017

- c. Media Visit ke media cetak Lombok Post pada tanggal 5 Juni 2017. Tujuan dilaksanakannya media visit ini adalah untuk meningkatkan kerjasama BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan pihak media.



Gambar 9 Media Visit ke Lombok Post 5 Juni 2017

- d. Media Visit ke media cetak Suara NTB yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2017. Tujuan dilaksanakannya media visit ini adalah untuk meningkatkan kerjasama BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan pihak media.



Gambar 10 Media Visit ke Suara NTB

- e. Goes to School dengan 5 SMA/K dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan BPK kepada siswa SMA/K dan memberikan informasi mengenai tugas pokok, peran, dan fungsi BPK yang dikemas secara menarik, yaitu dengan pemaparan materi dan tanya jawab, serta menggunakan sarana permainan agar dapat menarik minat siswa. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 siswa dan guru pendamping.



Gambar 11 BPK Goes to School – penyampaian materi oleh Kepala Perwakilan



Gambar 12 BPK Goes to School – seluruh panitia dan peserta

- f. Public Awareness @CFD dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya mengerti serta mengenal BPK, mengedukasi masyarakat luas, dan sebagai tolak ukur atas kegiatan tahun lalu 2016. Kegiatan ini dikemas secara menarik, yaitu dengan penyebaran 150 kuesioner ke berbagai segmen masyarakat sekitar, penyediaan booth untuk sarana tanya jawab, serta menggunakan sarana permainan agar dapat menarik minat masyarakat.



Gambar 13 Public Awareness @CFD – seluruh panitia



Gambar 14 Public Awareness @CFD – penyebaran kuesioner ke masyarakat sekitar

- g. Goes to Campus Universitas Hamzanwadi di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan BPK kepada mahasiswa/i dan memberikan informasi mengenai tugas pokok, peran, dan fungsi BPK yang dikemas secara menarik, yaitu dengan pemaparan materi dan tanya jawab, serta menggunakan sarana permainan agar dapat menarik minat mahasiswa/i.



Gambar 15 Goes to Campus – pemaparan materi oleh Kepala Perwakilan

- h. Talk Live di TVRI

Kegiatan Talk Live di TVRI dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017. Acara Talk live yang berdurasi waktu 60 menit ini menjelaskan secara umum tentang BPK dan LHP sebagai outputnya.



Gambar 16 Goes to Campus – pemaparan materi oleh Kepala Perwakilan

8. IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Realisasi tingkat pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2017 sebesar 93,26% dimana telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu sebesar 92%.



Gambar 16 Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB

9. IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IKU Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah IKU baru di tahun 2017. Realisasi di tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

F. SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

1. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Realisasi persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa tahun 2017 adalah 94,74% atau sebanyak 36 pemeriksa dari 38 pemeriksa di Perwakilan Provinsi NTB. Capaian ini belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

2. IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

Realisasi persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa) tahun 2017 adalah 85,71% atau sebanyak 30 non pemeriksa dari 35 non pemeriksa di Perwakilan Provinsi NTB. Capaian ini belum memenuhi target tahunan 2017 yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

G. SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Sasaran strategis ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Realisasi tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan Perwakilan tahun 2017 adalah 80,48%. Capaian ini belum memenuhi target tahunan 2017 yang ditetapkan yaitu sebesar 82%.

BAB IV PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan NTB Secara Umum

LAK BPK Perwakilan NTB ini merupakan sumbangan penyusunan LAK Auditama Keuangan VI BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi NTB mengalami kenaikan sebesar 1,64 dalam pencapaian skor kinerja, yaitu dari 97,06 pada tahun 2016 menjadi 98,37 pada tahun 2017. Perolehan skor kinerja tersebut merupakan formulasi dari skor tujuh Sasaran Strategis sebagai berikut:

	Sasaran Strategis	Skor
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	101,00
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	40,38
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	38,75
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	20,19
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	59,30
6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	34,89
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	98,15
SKOR KINERJA		98,37

Tabel 8 Skor Sasaran Strategis BPK Perwakilan NTB Tahun 2017

B. Penyebab Secara Umum Terjadinya Kenaikan Skor

BPK Perwakilan Provinsi NTB mengalami kenaikan dalam pencapaian skor kinerja pada tahun 2017 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Pencapaian IKU tahun 2017 tidak dapat banyak dibandingkan dikarenakan variabel sasaran strategis IKU tahun 2017 berbeda dengan tahun 2013 s.d. 2015.

C. Kendala Utama Penyebab Terjadinya Penurunan Skor

Pencapaian IKU tahun 2017 tidak dapat banyak dibandingkan dikarenakan variabel sasaran strategis IKU tahun 2017 berbeda dengan tahun 2013 s.d. 2015.

D. Strategi Pemecahan Masalah Serta Rencana Aksi yang Akan Diambil Terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengevaluasi kinerja Tahun 2017 dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan skor kinerja di tahun yang akan datang. Serta mempertahankan kinerja yang telah sesuai atau melebihi target pada kinerja periode berikutnya. Atas kendala-kendala yang ada, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan melakukan evaluasi ke dalam dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar target-target yang ada dapat segera tercapai.

Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi NTB ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Skor Tahun 2017
(1)	(2)		(3)		
1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	87,19%	105,00
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100,00
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100,00
	1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105,00
	2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	30%	105,00
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-	-
	3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,58	105,00
	3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
	3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100,00
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	100,00
	4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	50%	50,00
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	BB	88,89
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	82,72%	82,72
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	1	1	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Skor Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)			
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	-	-	-
	5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100,00
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100,00
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	5,4	105,00
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	93,26%	101,37
	5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00
6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	94,74%	94,74
	6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis.Manajerial (Non Pemeriksa)	95%	85,71%	90,22
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	82%	80,48%	98,15

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp19.156.804.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp18.404.457.942,00



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Udayana No. 22 Mataram, NTB
Telp. 0370-6163333, Fax. 0370-6162999

www.mataram.bpk.go.id